

## DAFTAR PUSTAKA

- Adrian Sutedi. 2010. *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja. 2004. *Seri Hukum Bisnis: Kepailitan*. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- A.P. Parlindungan. 2009. *Pendaftaran Tanah di Indonesia (PP Nomor 24 Tahun 1997)*. CV. Mandar Maju: Bandung.
- Boedi Harsono. 2020. *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan. Jakarta.
- Effendi Perangin. 1989. *Hukum Agraria di Indonesia (Suatu Telaah dari Sudut Pandang Praktisi Hukum)*. Rajawali. Jakarta.
- Elyta Ras Ginting. 2018. *Hukum Kepailitan (Rapat-Rapat Kreditor)*. Sinar Grafika: Jakarta.
- . 2018. *Hukum Kepailitan: Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. Alumni: Bandung.
- Gunawan Widjaja. 2005. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Hatta Isnaini Wahyu Utomo. 2020. *Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah*. Kencana: Jakarta.
- Herman Hermit. 2009. *Cara Memperoleh Sertifikat Tanah; Tanah Hak Milik, Tanah Negara, Tanah Pemda, dan Balik Nama; Teori dan Praktek Pendaftaran Tanah di Indonesia*. CV. Mandar Maju: Bandung.
- I Made Hendra Kusuma. 2019. *Problematika Notaris dalam Praktik*. P.T. Alumni: Bandung.
- I Made Pasek Diantha. 2017. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Kencana: Jakarta.
- I Ketut Oka Setiawan. 2019. *Hukum Pendaftaran Tanah dan Hak Tanggungan*. Sinar Grafika: Jakarta.

- Imran Nating. 2004. *Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan Harta Pailit*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta.
- Liliana Tedjo.saputro. 2021. *Keadilan dan Masyarakat Aplikasi Hukum Profesi Notaris dalam Kehidupan*. Butterfly Mamoli Press: Semarang.
- M. Hadi Shubhan. 2008. *Hukum Kepailitan (Prinsip, Norma dan Praktik di Peradilan)*. Kencana: Jakarta.
- Mariam Darus Badruzaman. 1991. *Perjanjian Kredit Bank*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Oemar Moechthar. 2017. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Airlangga University Press: Surabaya.
- Peter Mahmud Marzuki. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana: Jakarta.
- Rahayu Hartini. 2002. *Hukum Kepailitan*. Dirjen Dikti: Jakarta.
- Rio Christiawan. 2020. *Hukum Kepailitan & Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. PT RajaGrafindo Perkasa: Depok.
- Shidqi Noer Salsa. 2020. *Hukum Pengawasan Notaris di Indonesia dan di Belanda*. Kencana: Jakarta.
- Sunindhia dan Ninik Widiyanti. 1988. *Pembaharuan Hukum Agraria; Beberapa Pemikiran*. Bina Aksara: Jakarta.
- Supriadi. 2010. *Hukum Agraria*. Sinar Grafika: Jakarta.
- Susanti Adi Nugroho. 2018. *Hukum Kepailitan di Indonesia (Dalam Teori dan Praktik Serta Penerapan Hukumnya)*. Kencana: Jakarta.
- Sutan Remy Sjahdeini. 2016. *Sejarah, Asas, dan Teori Hukum Kepailitan*, Kencana: Jakarta.
- Titi S. Slamet. 2015. *Hakikat Hukum Kepailitan (Dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)*. Global Publishing: Yogyakarta.
- Urip Santoso. 2010. *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*. Kencana: Jakarta.

-----, 2016. *Pejabat Pembuat Akta Tanah (Perspektif Regulasi, Kewenangan dan Akta*. Kencana: Jakarta.

Widodo Dwi Putro, dkk. 2016. *Pembeli Beritikad Baik dalam Sengketa Perdata Berobyek Tanah*. LeIP. Jakarta.

Yudhi Setiawan. 2009. *Instrumen Hukum Campuran (Gemeenschapelijrecht) dalam Konsolidasi Tanah*, Rajawali Pers. Jakarta.

Zainal Asikin. 2020. *Hukum Kepailitan*. Penerbit Andi: Yogyakarta.

### **Skripsi:**

Abdul Hadi. 1987. *Jual Beli Tanah Hak Milik Tanpa Melalui PPAT*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Airlangga.

### **Jurnal:**

Adriel Michael Tirayo dan Yoefanca Halim. "Problematika Definisi Harta Pailit untuk Mencapai Kepastian Hukum dalam Pelaksanaan Kepailitan dan PKPU." Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum. Vol. 6. Nomor 2 Desember 2019.

Afar Chan & Fauzie Yusuf Hasibuan. "Sengketa Perjanjian Jual Beli Tanah dalam Perkembangan Hukum Perjanjian Nasional: Perspektif Hakim". Jurnal Nuansa Kenotariatan. Volume I. Nomor 1 Juli-Desember 2015.

Ayu Larasati. "Peralihan Hak Atas Tanah dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia." Zaaken Jo.urnal of Civil and Bussines Law. Vol. 1. Nomor 1 Februari 2020.

Baharudin. "Kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dalam Proses Jual Beli Atas Tanah." Keadilan Progresif. Volume 5. Nomor 1 Maret 2014.

Desvia Winandra & Hanafi Tanawijaya. "Penerapan Asas Terang dan Tunai dalam Jual Beli Tanah yang Merupakan Harta Bersama dalam Perkawinan (Studi Putusan Nomor 1/Pdt.G/2019/PN.Lbt)." Jurnal Hukum Adigama. Volume 3. Nomor 2 Desember 2020.

Husnul Mufarid, Imam Kuswahyono & Suhariningsih. "Implikasi Yuridis Jual Beli Tanah yang Tidak Dilakukan di Hadapan PPAT Terhadap

Proses Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah.” Jurnal Hukum Universitas Brawijaya. 2014.

Lendrawati & Roelend Santoso. “Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 67/PUU-XI/2013 tentang UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.” Journal of Judicial Review. Universitas Internasional Batam. Vol. XVII. Nomor 1 Juni 2015.

Leny Kurniawati. “Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pembeli Hak Atas Tanah.” Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol.2. Nomor 1 Februari 2018.

Sunarmi. “Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (*Civil Law System*) dengan Amerika Serikat (*Common Law System*).” e-USU Repository, 2004.

Tasyah Azhari, Roesnastiti Prayitno, Widodo Suryandono. “Pembatalan Akta Pernyataan Pemindahan dan Penyerahan Hak Milik Atas Tanah dan Kuasa yang Memuat Klausul Pemberian Kuasa Mutlak Oleh Notaris.” Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Vol.1. Nomor 001 2019.

#### **Internet:**

<https://money.kompas.com/read/2021/03/21/101141926/mengenal-apa-itu-pailit-dan-bedanya-dengan-bangkrut?page=all> (koran online).

#### **Putusan:**

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 31/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Nomor 05/Pailit/2000/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 481K/Pdt.Sus.Pailit/2020 Jo. Putusan Nomor 5 PK/Pdt.Sus-Pailit/2021.

Putusan Pengadilan Niaga Nomor 33/Pdt.Sus.Gugatan Lain-lain/2019/PN.Niaga.Jkt.Pst Jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1245K/Pdt.Sus-Pailit/2020.

#### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetbook* (BW).

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria (UUPA).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.